



Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin

INFO PENULIS

Verza Amellia Efendi
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
verzaamellia10@gmail.com

Yonnawati
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
Yonawati224@gmail.com

Martharia Putri Utami
Universitas Muhammadiyah Lampung
Indonesia
Martharia.tanjung@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol.5 No.2, Agustus 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Efendi, V. A., Yonnawati., & Utami, M. P. (2025). Implementasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Masyarakat di Desa Merak Batin. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1163-1169.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan global yang juga terjadi di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia menduduki peringkat kelima di Asia Tenggara. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk di Provinsi Lampung, telah dilakukan beberapa langkah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebagai langkah percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah pada aspek bagaimana dampak bantuan sosial yang diberikan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Merak Batin telah memberikan dampak positif dalam membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan bantuan PKH masih memiliki beberapa kendala, seperti minimnya keikutsertaan sebagian masyarakat dalam ketentuan dan persyaratan program serta terbatasnya jumlah pendamping dalam pengawasan dan pendataan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pendamping agar program dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: program keluarga harapan, bantuan sosial, kesejahteraan masyarakat, desa merak batin

Abstract

Poverty is one of the global issues that also exists in Indonesia. The poverty rate in Indonesia is ranked fifth in Southeast Asia. Furthermore, at the provincial and district/city levels including in Lampung, several steps have been taken to accelerate poverty alleviation. As a step to accelerate poverty alleviation, since 2007 the Indonesian Government has implemented the Family Hope Program (PKH) for community welfare. This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) as a form of social assistance to improve community welfare in Merak Batin Village. The method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The focus of the study is on the aspect of how the impact of social assistance provided by the government on the welfare of the people of Merak Batin Village, Natar District, South Lampung. The results of the study indicate that the implementation of PKH in Merak Batin Village has had a positive impact in helping beneficiary families meet basic needs, especially in the fields of education and health. The implementation of PKH assistance still has several obstacles, such as the minimal participation of some people in the provisions and requirements of the program and the limited number of assistants in supervision and data collection. Therefore, it is necessary to increase socialization and strengthen the capacity of assistants so that the program can run more optimally and sustainably.

Keywords: family hope program, social assistance, community welfare, merak batin village

A. Pendahuluan

Kesejahteraan dan kebaikan bersama adalah tujuan luhur setiap bangsa. kemerdekaan tidak hanya berarti lepas dari penjajahan, tetapi juga terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera serta terbebas dari kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari perlindungan bagi seluruh bangsa Indonesia dan tanah airnya, guna meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menjalani proses pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Namun, krisis moneter tahun 1997 memperparah kondisi kemiskinan, yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, seperti rendahnya tingkat kesehatan, gizi buruk, dan keterbelakangan dalam pendidikan.

Sebagai langkah percepatan dalam penanganan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Program perlindungan sosial ini, yang dikenal secara internasional sebagai *Conditional Cash Transfers (CCT)*, terbukti cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan kronis, di berbagai negara. Sebagai bantuan sosial bersyarat, PKH memberikan akses bagi keluarga miskin, khususnya ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia di lingkungan mereka. Selain itu, manfaat PKH juga diperluas untuk mendukung penyandang disabilitas dan lansia guna mempertahankan kesejahteraan mereka, sejalan dengan amanat konstitusi dan visi Nawacita Presiden RI. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, dengan tujuan utama memutus dan menghapus rantai kemiskinan yang selama ini menjadi hambatan dalam pembangunan negara. PKH dikembangkan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban serta membantu pesertanya dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dasar (Permana, Sasmito, dan Gunawan, 2018).

Program PKH adalah bagian dari agenda pemerintahan pusat yang di implementasikan sampai ke tingkat desa. Pada proses nya tidak menutup kemungkinan terjadinya kendala. Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui PKH, yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH dikembangkan sebagai bagian dari sistem perlindungan social yang bertujuan untuk meringankan beban rumah tangga sangat miskin dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar. Kriteria yang bias mendapatkan batuan PKH ini adalah

keluarga dengan golongan tidak mampu/ miskin dan juga pra sejahtera yang memiliki kriteria seperti keluarga tidak mampu/miskin, terdaftar dalam Dtkb, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau keajahteraan sosial, dan keluarga pra sejahtera

Temuan pra-riset di Desa Merak Batin menunjukkan bahwa sebanyak 466 keluarga menjadi penerima manfaat PKH, yang tersebar di tujuh dusun. Pelaksanaan program menunjukkan sejumlah keberhasilan, antara lain meningkatnya akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara pra-riset di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, diketahui bahwa kegiatan penyaluran ini mendapat dukungan dari pihak kecamatan, dengan harapan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan serta tetap memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kondusivitas lingkungan. Namun, ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan program ini. Salah satu permasalahan utama adalah data penerima bantuan yang belum diperbarui secara rutin. Masih terdapat warga yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat tetapi tetap menerima bantuan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan serius, terutama dalam merespons informasi dari pendamping dan dalam proses pengumpulan data yang berdampak pada keterlambatan penyaluran. Fenomena lain yang mencuat adalah adanya kecenderungan masyarakat untuk menyembunyikan kondisi ekonomi yang sebenarnya demi tetap memperoleh bantuan. Beberapa penerima enggan melaporkan peningkatan taraf hidup mereka karena takut kehilangan hak atas bantuan, sehingga program ini tidak sepenuhnya menjangkau kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Penelitian ini dibatasi pada kajian implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang dilaksanakan di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi proses pelaksanaan, efektivitas, serta dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat (KPM). Penelitian ini tidak mencakup program bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa atau program sembako, serta tidak membahas dimensi kebijakan nasional secara makro. Selain itu, analisis hanya dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi lokal pada tahun 2023–2024. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran khususnya berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Sedangkan manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu memecahkan permasalahan kesejahteraan masyarakat dengan program bantuan PKH yang sudah diberikan oleh pemerintah secara merata khususnya di desa Merak Batin Kecamatan Natar

B. Metodologi

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan atau penggunaan tertentu. Metode ilmiah berarti kegiatan penelitian mempunyai ciri-ciri ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis (Bungin, 2003:3). Rasional berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal dalam ruang lingkup akal manusia. Empiris berarti metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia dan dapat diamati serta diketahui oleh orang lain. Sistematis berarti bahwa proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2020) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Moleong, 2017).

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Merak batin Kecamatan Natar terkait program PKH, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Merak Batin memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai fungsi strategis yaitu sebagai komunikator, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penerapan program PKH.

1. Pemerintah Desa Sebagai Komunikator

Pemerintah Desa sebagai komunikator dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting dan strategis. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa turut serta menyampaikan informasi program, menjawab pertanyaan masyarakat, serta membantu menyosialisasikan kebijakan atau perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan PKH. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa Merak Batin telah memberikan dukungan dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi, menyediakan tempat untuk pertemuan kelompok PKH, serta menerima dan menindaklanjuti aduan atau keluhan dari masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Desa Merak Batin sebagai komunikator dinilai cukup baik, namun tetap memerlukan peningkatan agar program PKH dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran.

2. Pemerintah Desa Sebagai Sumber Daya

Pemerintah Desa Merak Batin berperan penting sebagai sumber daya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Narasumber menjelaskan bahwa pemerintah desa telah terlibat dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat, serta membantu menyampaikan perubahan data keluarga yang terjadi, seperti pindah domisili, kematian, atau perubahan status ekonomi. Selain itu, pemerintah desa menyediakan fasilitas dan sarana pendukung, seperti tempat pertemuan kelompok PKH, serta membantu pendamping dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan, narasumber juga menyampaikan bahwa peran pemerintah desa sebagai sumber daya masih dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal transparansi informasi, kecepatan penyampaian kebijakan baru, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi program.

3. Pemerintah Desa Sebagai Disposisi

Aparatur desa tidak hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat atau dinas sosial secara pasif, tetapi mereka menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab aktif terhadap keberhasilan program. Komitmen Pemerintah Desa Merak Batin terhadap PKH juga tampak dari kesediaan mereka untuk menjadi penghubung antara warga dengan instansi yang lebih tinggi, seperti Dinas Sosial atau koordinator kabupaten, ketika muncul permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan program. Sikap positif, keterbukaan, dan kepedulian ini menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

4. Pemerintah Desa Sebagai Struktur Birokrasi

Pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai fasilitator administratif, tetapi juga menjadi penghubung antara pendamping PKH dan masyarakat. Selain itu, mereka juga berperan dalam menyosialisasikan program kepada masyarakat dan menjadi tempat penyampaian keluhan atau kendala yang dihadapi oleh penerima bantuan. Namun demikian, beberapa warga juga mengungkapkan perlunya peningkatan dalam hal transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Selain itu, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Merak Batin menunjukkan dampak yang signifikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, yang meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta sosial budaya.

1. Kependudukan

Pendamping sosial menyoroti pentingnya akurasi data dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban program, seperti kehadiran anak di sekolah dan kunjungan posyandu. Korcam menegaskan bahwa komposisi penduduk seperti jumlah ibu hamil, anak sekolah, dan lansia sangat menentukan dalam penetapan jumlah penerima. Menurut mereka, masih ada warga yang lebih layak namun tidak terdaftar, dan hal ini menimbulkan kecemburuan sosial. Namun, mereka juga sadar bahwa jumlah penerima terbatas dibandingkan dengan jumlah keluarga miskin yang ada. Akurasi dan pembaruan data kependudukan sangat penting agar bantuan yang

diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan kerja sama antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat agar program PKH berjalan dengan lebih efektif dan merata.

2. Kesehatan

Aspek kesehatan dalam pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui kewajiban untuk mengikuti layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak, masyarakat penerima manfaat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan keluarga. Peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) telah mendorong perubahan pola hidup yang lebih sehat di kalangan keluarga prasejahtera. Hal ini berdampak pada menurunnya risiko penyakit, meningkatnya produktivitas keluarga, serta terwujudnya anak-anak yang tumbuh dengan baik dan siap menerima pendidikan. Dengan demikian, komponen kesehatan dalam PKH bukan hanya menjadi syarat administratif semata, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membentuk keluarga yang lebih mandiri dan sejahtera di Desa Merak Batin.

3. Pendidikan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Program ini secara nyata membantu meringankan beban biaya pendidikan serta meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya menyekolahkan anak-anak mereka. Pendamping PKH berperan aktif dalam memfasilitasi sosialisasi, monitoring kehadiran siswa, serta memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai dengan ketentuan, yakni mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala berupa pemahaman yang belum merata di kalangan masyarakat terkait tujuan PKH, penggunaan dana yang belum sepenuhnya tepat sasaran, serta keterbatasan akses dan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, lembaga pendidikan, serta masyarakat guna memaksimalkan manfaat program dan mendorong tercapainya kesejahteraan yang berkelanjutan melalui pendidikan. Namun, masih terdapat tantangan, seperti pemahaman yang belum merata mengenai kewajiban pendidikan bagi anak-anak KPM, penggunaan bantuan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, dan keterbatasan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah. Untuk itu, perlu peningkatan sinergi antara pemerintah desa, pendamping PKH, sekolah, dan masyarakat agar program ini benar-benar mendukung peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan yang berkelanjutan.

4. Ketenaga Kerjaan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang ketenagakerjaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini membantu meningkatkan keterampilan kerja masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pendamping PKH. KPM memiliki peluang untuk mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Pendamping PKH juga memfasilitasi akses KPM terhadap informasi peluang pekerjaan dan memberikan pendampingan dalam pencarian kerja, sehingga masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mulai beralih ke pekerjaan yang lebih stabil dan mandiri. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti pemanfaatan bantuan yang tidak selalu tepat sasaran, keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses terhadap pekerjaan formal yang layak. Meskipun tantangan masih ada, program PKH di bidang ketenagakerjaan berkontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin. Peningkatan koordinasi antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan lembaga terkait lainnya diharapkan dapat lebih mengoptimalkan manfaat program ini.

5. Taraf dan Pola Konsumsi

Implementasi program PKH di Desa Merak Batin telah membawa dampak positif terhadap taraf hidup dan pola konsumsi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat. Program ini membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas konsumsi, terutama terkait gizi anak dan pendidikan. Namun, keberhasilan program ini tidak semata ditentukan oleh bantuan materi, melainkan juga oleh pendampingan yang intensif, edukasi literasi keuangan, dan pembinaan pola konsumsi sehat. Masih terdapat tantangan dalam hal pemanfaatan dana yang kurang tepat sasaran serta kurangnya pemahaman sebagian KPM terhadap prioritas kebutuhan rumah tangga. Dengan penguatan edukasi, evaluasi berkala, dan

kolaborasi antara pendamping, aparaturnya desa, serta masyarakat, implementasi PKH di bidang konsumsi dapat lebih efektif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan jangka panjang

6. Perumahan dan Lingkungan

Pengaruh perumahan dan lingkungan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Merak Batin tidak dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan yang tidak mendukung, baik dari sisi fisik perumahan yang tidak layak huni maupun kurangnya infrastruktur yang memadai, dapat menghambat manfaat yang diterima oleh penerima bantuan. Oleh karena itu, untuk menciptakan keberhasilan yang lebih berkelanjutan, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas perumahan, infrastruktur, dan lingkungan sosial yang mendukung, agar penerima PKH dapat memaksimalkan potensi bantuan tersebut dalam mensejahterakan kehidupan mereka.

7. Sosial Budaya

Sosial budaya memiliki pengaruh yang besar dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Merak Batin. Program ini, meskipun berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat, harus memperhatikan dinamika sosial budaya yang ada di masyarakat. Keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga bagaimana program ini diterima dan diinternalisasi dalam budaya masyarakat. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang, PKH dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang implementasi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan tahun 2024, prespektif Edward dilihat dari empat variabel yaitu pemerintah Desa Merak Batin memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui berbagai fungsi strategis. Sebagai komunikator, pemerintah desa membantu menjembatani informasi antara masyarakat, pendamping PKH, dan pihak pemerintah, meskipun masih perlu peningkatan dalam hal kecepatan dan pemerataan informasi. Sebagai sumber daya, pemerintah desa menyediakan dukungan administratif, fasilitas, serta membantu proses pendataan dan penyelesaian masalah, meskipun transparansi dan pelibatan masyarakat masih perlu diperkuat. Dari sisi disposisi, pemerintah desa menunjukkan komitmen dan kepedulian tinggi terhadap keberhasilan program, dengan bersikap aktif, solutif, dan edukatif dalam menjangkau masyarakat. Sementara itu, sebagai bagian dari struktur birokrasi, mereka berperan dalam pendataan, sosialisasi, dan penanganan keluhan, meski akurasi dan ketepatan sasaran masih menjadi perhatian. Secara keseluruhan, keterlibatan pemerintah desa terbukti krusial dalam mendukung efektivitas PKH, namun tetap dibutuhkan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan partisipasi agar program ini benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Merak Batin menunjukkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari segi kependudukan, keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi dan pembaruan data, karena ketidaksesuaian data dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan memicu kecemburuan sosial. Dalam aspek kesehatan, program ini mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan kesehatan dasar dan pola hidup bersih, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup keluarga miskin. Dari sisi pendidikan, PKH membantu meringankan beban biaya sekolah dan meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan, meskipun masih ada tantangan dalam pemahaman serta penggunaan bantuan yang belum sepenuhnya tepat. Dalam aspek ketenagakerjaan, program mendorong pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan akses informasi pekerjaan, meski keterbatasan modal dan akses ke pekerjaan formal masih menjadi kendala. Pada aspek taraf dan pola konsumsi, bantuan PKH terbukti membantu pemenuhan kebutuhan dasar, namun keberhasilannya bergantung pada literasi keuangan dan edukasi konsumsi sehat. Sementara itu, kondisi perumahan dan lingkungan turut memengaruhi efektivitas program, sehingga diperlukan upaya kolaboratif untuk memperbaiki infrastruktur dasar. Terakhir, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap program dipengaruhi oleh norma dan nilai setempat, sehingga pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal diperlukan agar program benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan secara maksimal.

Namun dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Merak Batin pemerintah Desa mengalami tantangan seperti data penerima bantuan yang belum diperbarui secara rutin. Masih terdapat warga yang seharusnya sudah tidak memenuhi syarat tetapi tetap menerima bantuan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan serius,

terutama dalam merespons informasi dari pendamping dan dalam proses pengumpulan data yang berdampak pada keterlambatan penyaluran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Merak Batin, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program melalui fungsi komunikatif, administratif, dan koordinatif. Program PKH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Dalam mengimplementasikan program PKH, masih terdapat hambatan signifikan berupa rendahnya partisipasi aktif masyarakat dan belum optimalnya akurasi data kependudukan yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan data dan koordinasi antar lembaga, serta pembukaan ruang partisipatif yang mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan program. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai penerima manfaat juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemanfaatan bantuan yang tepat guna. Selain itu, penciptaan sistem komunikasi yang terbuka, responsif, dan kolaboratif antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan masyarakat menjadi kunci penting agar program PKH dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

E. Referensi

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
 Bintaro. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
 Bogdan, R. C. (dalam Sugiyono, 2018). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
 Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Texas A & M University: Congressional Quarterly Press.
 Hadi, A. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
 Karmiana, C. (2023). *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (dalam Sugiyono, 2018). *Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
 Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
 Mulyadi. (2015). *Implementasi organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
 Permana, A., Sasmito, Y., & Gunawan, H. (2018). *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2).
 Putri, M. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
 Rifa'i. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
 Ramdani, R. (2022). *Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Aceh Selatan (Studi Kasus Gampong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
 Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
 Sunarti, E. (2012). *Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di pedesaan dan perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB. Bogor [ID]: LPPM.
 Taufik, Mhd. dan Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.
 Utomo, D., Abdul, H., & Heru, R. (2013). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup rumah tangga miskin*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(1), 29-34.
 Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.
 Widodo Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.